

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**  
**TENTANG**  
**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA**  
**TIDAK MAMPU ASAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI**  
**IAIN SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

NOMOR : 7386/-072

NOMOR : B-12/In.10/HM.01/05/2018

Pada hari ini Kamis. tanggal empat belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (14-05-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Sopan Adrianto : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. berkantor di Jalan Budi Utomo No. 3 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 2381/-1.851 tanggal 27 November 2017. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. H. Mudofir : Rektor IAIN Surakarta berkantor di Jalan Pandawa, Puncangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/07953. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Surakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan Tinggi Strata Satu (S1) dengan memberikan membantu biaya pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bersedia mendukung program PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Asal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di IAIN Surakarta Tahun Akademik 2017/2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 PENGERTIAN

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan/atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
- c. Bantuan Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada Mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian adalah Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Rekonsiliasi data;
- c. Pengalihan status pembiayaan calon Mahasiswa;
- d. Pembiayaan biaya pendidikan;
- e. Kegiatan belajar dan pembinaan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan.



**Pasal 4  
PERSYARATAN**

Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan/atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU);
- b. Melampirkan hasil lulus tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- c. Bantuan Biaya Pendidikan maksimal 10 Semester untuk Program Strata Satu dan maksimal 14 semester bagi yang berlanjut pada Program Profesi tertentu, atau disesuaikan dengan ketentuan;
- d. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari pihak lain manapun; dan
- e. Tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

**Pasal 5  
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian.

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Mendapat informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapat informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan hasil nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- d. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan PIHAK KEDUA; dan
- e. Mendapat informasi data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan memiliki KJP dan/atau KJMU melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
- b. Melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa asal Provinsi DKI Jakarta yang diterima di PIHAK KEDUA, data mahasiswa yang memiliki KJP dan/atau KJMU;
- c. Mengirim nama Mahasiswa yang definitif mendapatkan Bantuan Biaya

- Pendidikan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menganggarkan dan membayarkan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan di PIHAK KEDUA;
  - e. Melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari PIHAK KEDUA; dan
  - f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- b. Menetapkan besarnya Biaya Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- c. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
- d. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan tindakan selanjutnya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa yang menerima bantuan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- d. Melakukan pembinaan bagi Mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
- e. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari PIHAK KEDUA.
- f. Menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada PIHAK PERTAMA; dan
- g. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.



**Pasal 8  
BIAYA PENDIDIKAN**

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah sebesar data sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini per semester per mahasiswa, yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening :  
Nama Bank : Bank BRI  
Nomor : 00000182-01-000312-30-6  
Atas nama : BPG 028 IAIN Surakarta
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan PIHAK PERTAMA.
- (3) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada PIHAK PERTAMA, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi PARA PIHAK.

**Pasal 9  
PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Perjanjian ini melalui Rektor pada PIHAK KEDUA.

**Pasal 10  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

**Pasal 11  
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PIHAK KEDUA menunjuk Tim Khusus untuk itu.

**Pasal 12  
PEMBIAYAAN**

Blaya pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

**Pasal 13  
KEADAAN MEMAKSA**

Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

**Pasal 14  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
  - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

**Pasal 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 16  
PERUBAHAN (ADENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
REKTOR IAIN SURAKARTA



H. MUDOFIR  
NIP 197008021998031001

PIHAK PERTAMA  
# KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA ,



SOPAN ADRIANTO  
NIP 196211071996031001



Lampiran 1: Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan IAIN Surakarta

Nomor : 7386/-072

Nomor

Tanggal : 14 Mei 2018

DATA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN  
DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI PADA SEMESTER GANJIL  
DI IAIN SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA	NIK	FAKULTAS/ JURUSAN	BIAYA PENDIDIKAN/ SEMESTER
1.	RAFI FATHIH STAURI	3171081902990002	SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM	Rp 1.250.000
2.	DESI KURNIAWATI	3172044112990007	HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)	Rp 2.000.000
3.	AL URWATUL HANA TARA	3172045410980005	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	Rp 1.500.000
4.	WAHID NUR KARIM	3173010508990019	HUKUM PIDANA ISLAM	Rp 2.000.000
5.	HERLINA OKTAVIANI	3173014912981002	PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL	Rp 3.000.000
6.	GURUH ALIFFI ARDANA	3173051510980003	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	Rp 1.250.000
7.	ABDUL HADI	3173051710970006	HUKUM PIDANA ISLAM	Rp 1.000.000
8.	SHAFIRA ARIFAH PUTRI	3173057010990008	HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)	Rp 1.500.000
9.	SEPTIANI	3175064912981003	EKONOMI SYARIAH (MANAJEMEN SYARIAH)	Rp 1.250.000
10.	DITA OKTAVIANI PUTRI	3175065210990010	PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL	Rp 2.500.000

PIHAK KEDUA  
REKTOR IAIN SURAKARTA



H. MUDOFIR ✓  
NIP. 197008021998031001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA, A



SOPAN ADRIANTO  
NIP. 196211071996031001

2/12



Lampiran 2: Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi  
DKI Jakarta dengan IAIN Surakarta

Nomor : 7386/-072

Nomor

Tanggal : 14 Mei 2018

DATA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN  
DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI PADA SEMESTER GENAP  
DI IAIN SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA	NIK	FAKULTAS/ JURUSAN	BIAYA PENDIDIKAN/ SEMESTER
1.	SEPTIANI	3175064912981003	EKONOMI SYARIAH (MANAJEMEN SYARIAH)	Rp 1,250,000
2.	WITRI LESTARI	3174095211990007	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp 3,000,000
3.	DESI KURNIAWATI	3172044112990007	HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)	Rp 2,000,000
4.	DITA OKTAVIANI PUTRI	3175065210990010	PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL	Rp 2,500,000
5.	HERLINA OKTAVIANI	3173014912981002	PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL	Rp 3,000,000
6.	MUHAMAD IMRON	3173080812970006	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	Rp 1,750,000
7.	SEPTIAN ADI SAPUTRO	3173012509981002	HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)	Rp 2,000,000
8.	SHAFIRA ARIFAH PUTRI	3173057010990008	HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)	Rp 1,500,000
9.	WAHID NUR KARIM	3173010508990019	HUKUM PIDANA ISLAM	Rp 2,000,000
10.	ABDUL HADI	3173051710970006	HUKUM PIDANA ISLAM	Rp 1,000,000
11.	RAFI FATHIH STAURI	3171081902990002	SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM	Rp 1,250,000
12.	AL URWATUL HANA TARA	3172045410980005	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	Rp 1,500,000
13.	GURUH ALIFFI ARDANA	3173051510980003	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	Rp 1,250,000

PIHAK KEDUA  
REKTOR IAIN SURAKARTA



H. MUDOFIR ✓  
NIP 197008021998031001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



SOPAN ADRIANTO  
NIP 196211071996031001